

Jurnal Komunikasi

The Muslim Show: *Soft Contra "Labeling"* Melalui Media Sosial

Yuliana Rakhmawati

Peranan Komunikasi Customer Service Terhadap Kepuasan Pelanggan Lintas Semesta Surabaya

Victor Marulitua Lumbantobing

Strategi *Public Relations* Dalam Meningkatkan Citra Perguruan Tinggi Swasta Di Jawa Timur (Studi Kasus Perguruan Tinggi Swasta di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur)

Teguh Hidayatul Rachmad

Konstruksi Kiai Oleh Masyarakat Desa Gadu Timur Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep

Anis Kurli

Strategi Media Relations Humas PT. Pelabuhan Indonesia III Dalam *Handling Crisis* Pemberitaan Media

Agesty Sabreyna RM, R. Bambang Moertijoso

Politik Pluralitas dan Demokratisasi Media Dalam Penguatan Masyarakat Sipil

Imam Sofyan

Penerapan *Integrated Marketing Communication* (IMC) di Media Radio Segara FM Bangkalan

Ipin Rahmadi, Dewi Quraisyin

***Agenda Setting Function* (Studi Kasus Krisis Ekonomi Amerika dan Global)**

Netty Dyah Kurniasari

Jurnal Komunikasi

Vol. IX. No. 1, Maret 2015

ISSN 1978-4597

Penanggung Jawab

Surokim

Ketua Penyunting

Netty Dyah Kurniasari

Sekretaris Penyunting

Imam Sofyan

Teguh H. Rachmad

Penyunting Pelaksana

Yuliana Rahmawati

Dewi Quraisyin

Dessy trisilowaty

Syamsul Ariffin

Penyunting Ahli

Sasa Djuarsa Sandjaja

Pawito

Prahastiwi Utari

Administrasi

Syamsul Gunawan

Achmad Fauzi

Alamat Redaksi :

Jurusan Ilmu Komunikasi

Universitas Trunojoyo Madura

Jl. Raya Telang PO. BOX 02

Bangkalan 69162

Telp. 031-30123390

Fax. 031-3011506

Email :

jurnalikomutm@gmail.com

The Muslim Show: *Soft Contra "Labeling"* Melalui Media Sosial

Yuliana Rahmawati (1-12)

Peranan Komunikasi Customer Service Terhadap Kepuasan Pelanggan Lintas Semesta Surabaya

Victor Marulitua Lumbantobing (13-20)

Strategi *Public Relations* Dalam Meningkatkan Citra Perguruan Tinggi Swasta di Jawa Timur. (Studi Kasus Perguruan Tinggi Swasta di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur)

Teguh Hidayatul Rachmad (21-40)

Konstruksi Kiai Oleh Masyarakat Desa Gadu Timur Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep

Anis Kurli (41-56)

Strategi Media Relations Humas PT. Pelabuhan Indonesia III Dalam *Handling Crisis* Pemberitaan Media

Agesty Sabreyna RM, R. Bambang Moertijoso (57-72)

Politik Pluralitas dan Demokratisasi Media Dalam Penguatan Masyarakat Sipil

Imam Sofyan (73-82)

Penerapan *Integrated Marketing Communication* (IMC) di Media Radio Segara FM Bangkalan

Ipin Rahmadi, Dewi Quraisyin (83-94)

Agenda Setting Function (Studi Kasus Krisis Ekonomi Amerika dan Global)

Netty Dyah Kurniasari (95-104)

Jurnal Komunikasi adalah media untuk pengembangan disiplin ilmu komunikasi. memfokuskan kajiannya pada hasil studi di bidang komunikasi yang dilakukan melalui berbagai ragam sudut pandang. Redaksi menerima naskah, baik berupa ringkasan hasil penelitian maupun kajian yang relevan dengan misi jurnal. Redaksi dapat mengubah naskah sepanjang tidak mengubah makna keseluruhannya, Naskah yang dimuat dalam jurnal komunikasi sepenuhnya merupakan pendapat dan tanggung jawab penulis dan tidak selalu segaris atau mencerminkan pendapat redaksi.

Kata Pengantar

Jurnal Ilmu Komunikasi edisi Maret 2015 ini menghadirkan tema yang bervariasi, mulai dari kajian media, kajian budaya sampai komunikasi bisnis. Kajian media diawali oleh tulisan Yuliana Rahmawati yang berjudul *The Muslim Show : Soft Contra "Labeling" Melalui Media Sosial*. Tulisan ini mengupas tentang reaksi yang dilakukan oleh pemeluk agama Islam di komik *The Muslim Show*. Seperti kita ketahui setelah peristiwa 9/11, masyarakat muslim mendapatkan labeling sebagai agama yang menyimpang, fundamentalis dan teroris. Sekelompok warga Muslim mencoba mengcounter pemberitaan ini melalui media komik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Muslim Prancis berusaha untuk menunjukkan image yang positif dan bahwa Islam agama cinta damai.

Kajian komunikasi bisnis diawali dengan tulisan Victor Marulitua Lumbantobing yang membahas tentang Peranan Komunikasi Customer Service Terhadap Kepuasan Pelanggan Lintas Semesta Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya hubungan yang kuat dan positif antara peranan komunikasi yang dilakukan Customer Service terhadap kepuasan pelanggan CV Lintas Semesta khususnya penguasaan product knowledge. Dengan menguasai bentuk layanan yang dimiliki oleh CV Lintas Semesta dan kemampuan komunikasi yang baik untuk memberikan informasi yang tepat serta mampu mendengarkan informasi yang disampaikan pelanggan, baik yang berbentuk keluhan, kritik, saran atas jasa yang dibeli oleh konsumen hingga dapat mengikat pelanggan menjadi loyal kepada perusahaan.

Selanjutnya tulisan oleh Teguh Hidayatul Rachmad yang berjudul *Strategi Public Relations Dalam Meningkatkan Citra Perguruan Tinggi Swasta di Jawa Timur*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua konsep yang dipakai adalah strategi marketing dan strategi public relations. Kedua strategi dianalisis dari sisi internal dan eksternal. Studi tersebut menyimpulkan bahwa strategi public relations yang dilakukan PN Jawa Timur efektif, namun harus dikombinasi dengan pendekatan ke calon mahasiswa baru. Lebih lanjut, citra yang positif juga bisa dipertahankan dengan cara meningkatkan kualitas servis dan fasilitas di kampus.

Ipin Rahmadi dan Dewi Quraisyin melakukan penelitian tentang Penerapan Integrated Marketing Communication (IMC) di Media Radio Segara FM Bangkalan. Studi ini ingin mengulas tentang aplikasi konsep IMC yang sudah dilakukan oleh radio Segara Bangkalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Radio Segara Bangkalan menggunakan enam konsep IMC yaitu advertising, public relations, personal selling, sales promotion, direct marketing dan interactive marketing.

Masih tentang komunikasi bisnis. Agesty Sabreyna dan Bambang Moertijoso

mengulas topik tentang Strategi Media Relations Humas PT. Pelabuhan Indonesia III Dalam *Handling Crisis* Pemberitaan Media. Penelitian menunjukkan ada beberapa langkah yang dilakukan Humas PT Pelindo dalam menghadapi krisis. : Yaitu tahap analisis, identifikasi dan respon media.

Anis Kurli dan Yuliana Rakhmawati mengupas tentang Konstruksi Kiai Oleh Masyarakat Desa Gadu Timur Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat mengkonstruksi kiai sebagai ulama (pemimpin Islam), Kiai sebagai tokoh kharismatik serta sebagai figur politik.

Kajian tentang media juga dilakukan oleh Imam Sofyan dengan artikel berjudul Politik Pluralitas dan Demokratisasi Media Dalam Penguatan Masyarakat Sipil. Artikel ini mencoba untuk mendeskripsikan teori tentang politik pluralitas dalam konteks masyarakat Indonesia. Selain itu juga membahas tentang peran media dalam mengawal demokrasi dan memperkuat masyarakat sipil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perspektif politik dan media dalam upaya pembangunan *civil society* dapat terbentuk melalui model ruang publik Habermas. Dengan sistem politik yang terbuka, politik yang berpihak pada kepentingan masyarakat akan mampu menciptakan sistem media yang bebas sebagai perwujudan demokrasi. Media untuk selanjutnya dapat menjalankan perannya secara fungsional dalam menunjang proses demokratisasi dengan memberikan ruang publik yang bebas pada masyarakat. Pada akhirnya, masyarakat yang *well informed, educated society* berpeluang besar bagi penciptaan masyarakat sipil sebagaimana yang diharapkan tanpa harus *vis a vis* terhadap negara.

Kajian media sebagai penutup edisi maret ini tentang *Agenda Setting Function* (Studi Kasus Krisis Ekonomi Amerika dan Global) yang dilakukan oleh Netty Dyah Kurniasari Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah agenda media berpengaruh terhadap agenda publik khususnya tentang pemberitaan krisis ekonomi Amerika dan global. Metode penelitian yang digunakan yaitu analisis isi dengan cara membandingkan pemberitaan di media tentang krisis ekonomi dengan apa yang terjadi di publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara agenda media dan agenda publik tentang peristiwa krisis ekonomi Amerika dan global.

POLITIK PLURALITAS DAN DEMOKRATISASI MEDIA DALAM PENGUATAN MASYARAKAT SIPIL

Imam Sofyan

Dosen Prodi Ilmu Komunikasi FISIB Universitas Trunojoyo Madura,

Email: imamsofyan@hotmail.com

ABSTRACT

*Democratization in every aspect of life as well as the impact of the demands of the process of political change is considered positive or negative impact for changes in society, especially for developing countries, which are in transition to developed countries to be desired, which characterized the openness of society. A country that is also expected to provide assurance and compliance for *penyejahteraan* society (welfare state). This article intends to describe theoretically the political concept of plurality in the context of Indonesian society follows the role of the media in achieving democratization and strengthening civil society.*

Keywords: *political plurality, the democratization of the media, civil society*

I. PENDAHULUAN

Mengidam-idamkan terwujudnya *welfare state* sebagai wadah bagi pewujudan masyarakat sipil pastilah membutuhkan proses politik yang memuliakan sekaligus mengutamakan kehendak publik. Tentunya proses ini tidak mudah mengingat negara sebagai intitusi formal yang *legitimate* dalam menjalankan mekanisme politik pada kenyataannya tidak selalu netral, yang membuat politik menjadi tidak mulia lagi, penuh konflik dan syarat dengan berbagai kepentingan yang kurang mensejahterahkan masyarakat.

Sangat dimungkinkan keinginan menuju pembentukan masyarakat sipil

dalam wadah negara maju tersebut menunjukkan indikasi positif apabila dilihat dari berbagai perubahan yang muncul seiring dengan terjadinya perubahan konstalasi politik global. Setidaknya ada tiga perubahan mendasar yang turut mengarahkan sekaligus menandai permulaan politik yang dapat dipandang bermuara pada pembentukan masyarakat sipil dengan berbagai implikasinya. *Pertama*, kecenderungan perubahan konstalasi politik nasional, dari pola bipolar ke pola multipolar. *Kedua*, menguatnya peran dan hubungan antara ketiga komponen, yakni institusi politik, organisasi media dan masyarakat.

Ketiga, munculnya isu-isu baru sebagai konsekuensi logis dari menguatnya hubungan ketiga komponen tersebut, seperti hak partisipasi dan kompensasi politik yang mensejahterakan bagi warga negara, kebebasan pers bagi perwujudan demokrasi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pemerintahan sebagai prasyarat penciptaan *clean government* dan *good governance*, dan lain sebagainya.

Mendasarkan pada pemikiran tersebut, perlu kiranya dikaji praktik politik dan peran media dalam pembangunan masyarakat sipil. Tulisan ini bermaksud untuk menjelaskan keterkaitan antara politik dan media tersebut, dalam arti bagaimana politik tersebut diwujudkan, serta peran yang seharusnya dimainkan oleh institusi media dalam perwujudan masyarakat sipil, masyarakat yang mandiri secara politik, ekonomi dan budaya dalam pencapaiannya menuju masyarakat yang lebih maju, adil dan sejahtera sebagaimana yang dicita-citakan bersama.

II. Pembahasan

***Civiv Virtue* dan Politik Menyantuni Pluralitas**

Pada dasarnya ide pembentukan negara adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Tugas negara adalah untuk memberikan "jaminan" kepada warganya dalam memperoleh kehidupan secara layak. Dari sinilah kemudian lahir konsep

welfare state, yakni negara sejahtera yang dapat menjamin kebahagiaan hidup bagi rakyatnya. Negara wajib untuk melindungi, mendidik, dan membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh masyarakat. Atas dasar itu, pengelola negara (pemerintah dengan seperangkat politiknya) merupakan *public service* yang bertugas untuk melayani kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, negara menjadi jawaban fungsional terhadap segala permasalahan yang menimpa kehidupan masyarakat. (Rumadi, 2000)

Bagaimana konsep negara tersebut terwujudkan, tentunya bergantung pada praktek politik yang dijalankan oleh pengelola negara. Politik hanyalah merupakan seperangkat sistem yang dinamis, cara yang dapat dipilih dan ditentukan secara kolektif bentuknya guna pencapaian tujuan kehidupan dan kebaikan bersama yang diinginkan. Pada tataran ini, politik dituntut untuk bisa berpihak pada kebaikan umum, kebaikan untuk komunitas bersama yakni rakyat. Dan untuk pencapaian tersebut diperlukan sebuah kesadaran bersama untuk menempatkan politik dalam koridor etika dan moral.

Aristoteles dalam konsepsi politiknya, pertama-tama mengkaitkan politik dengan etika. Etika muncul sebagai upaya pencarian tata moral, dan politik merupakan praksis penciptaan tata moral bagi kebaikan umum. Dalam catatannya, kebaikan umum tidak mungkin tercipta tanpa adanya *virtus* (keadilan,

kebijaksanaan, solidaritas, dll.). Berbagai keutamaan tersebut dilihat bukan sebagai kualitas pribadi per individu, melainkan sebagai kualitas negara kota Yunani Kuno (*polis*). Suatu tindakan atau tatanan disebut adil bukan karena penetapan hukum, melainkan karena berupa keutamaan yang membawa kebaikan umum, yang berarti tata solidaritas dalam *polis*. Pemikiran inilah yang diadopsi oleh Jean Jacques Rousseau sebagai dasar tata penciptaan negara republik. Dalam sejarah pemikiran politik, konsepsi tersebut dikenal sebagai tradisi *civic virtue*. Menurutnya, *virtus* menyangkut penyesuaian kehendak individual pada kehendak komunitas. Sumber moralitas bukanlah individu melainkan komunitas. (Priyono, 2000)

Berdasarkan padarefleksipemikiran tersebut, politik di Indonesia diharapkan menjadi politik yang berlandaskan pada nilai-nilai kemasyarakatan. Politik moral yang menyantuni masyarakat dengan berbagai pluralitasnya sebagai kosekuensi masyarakat Indonesia yang serba majemuk. Dengan demikian, esensi politik pada masyarakat adalah upaya bersama untuk menegakkan keadilan (*equality*) dan kemerdekaan (*freedom*) dalam kebersamaan masyarakat. Dan selama masyarakat berupaya untuk meraih keadilan dan kemerdekaan secara bersama-sama, selama itu pulalah ia membutuhkan negara.

Sebaliknya dalam konteks Indonesia, negara hubungannya dengan masyarakat tidaklah tepat apabila

dipandang sebagai entitas yang berhadapan. Politik yang menyantuni pluralitas menjadi inheren dalam hubungan antara negara dengan demokrasi, dan kekuatan demokrasi yang terbesar berada ditangan dan merupakan kehendak masyarakat. Oleh karenanya konsep *civil society* di Indonesia, selayaknya dipandang sebagai partner negara guna pencapaian tujuan bersama negara dan masyarakat.

Pluralitas dalam Wadah *Welfare State*

Sebelum mendiskusikan apa itu *welfare state* (kesejahteraan negara), ada baiknya dibahas sejenak konsep kesejahteraan (*welfare*) yang sering diartikan berbeda oleh orang dan negara yang berbeda. Merujuk pada Spicker (1995), Midgley, Tracy dan Livermore (2000), Thompson (2005), Suharto, (2005a), dan Suharto (2006), pengertian kesejahteraan sedikitnya mengandung empat makna.

1. **Sebagai kondisi sejahtera (*well-being*).** Pengertian ini biasanya menunjuk pada istilah kesejahteraan sosial (*social welfare*) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material. Midgley, et al (2000: xi) mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai “...*a condition or state of human well-being.*” Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan

dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat dipenuhi; serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya.

2. **Sebagai pelayanan sosial.** Di Inggris, Australia dan Selandia Baru, pelayanan sosial umumnya mencakup lima bentuk, yakni jaminan sosial (social security), pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial personal (personal social services).
3. **Sebagai tunjangan sosial** yang, khususnya di Amerika Serikat (AS), diberikan kepada orang miskin. Karena sebagian besar penerima *welfare* adalah orang-orang miskin, cacat, penganggur, keadaan ini kemudian menimbulkan konotasi negative pada istilah kesejahteraan, seperti kemiskinan, kemalasan, ketergantungan, yang sebenarnya lebih tepat disebut "*social illfare*" ketimbang "*social welfare*".
4. **Sebagai proses atau usaha terencana** yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan (pengertian pertama) melalui pemberian pelayanan sosial (pengertian ke dua) dan tunjangan sosial (pengertian ketiga).

Pengertian tentang kesejahteraan negara tidak dapat dilepaskan dari empat

definisi kesejahteraan di atas. Secara substansial, kesejahteraan negara mencakup pengertian kesejahteraan yang pertama, kedua, dan keempat, dan ingin menghapus citra negatif pada pengertian yang ketiga. Dalam garis besar, kesejahteraan negara menunjuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya. Spicker (1995:82), misalnya, menyatakan bahwa kesejahteraan negara "...stands for a developed ideal in which welfare is provided comprehensively by the state to the best possible standards."

Negara kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial (*social policy*) yang di banyak negara mencakup strategi dan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, terutama melalui perlindungan sosial (*social protection*) yang mencakup jaminan sosial (baik berbentuk bantuan sosial dan asuransi sosial), maupun jaring pengaman sosial (*social safety nets*).

Konsep kesejahteraan negara tidak hanya mencakup deskripsi mengenai sebuah cara pengorganisasian kesejahteraan (*welfare*) atau pelayanan sosial (*social services*). Melainkan juga sebuah konsep normatif atau sistem pendekatan ideal yang menekankan bahwa setiap orang harus memperoleh pelayanan sosial sebagai haknya. Kesejahteraan negara juga merupakan anak kandung

pergumulan ideologi dan teori, khususnya yang bermatra sayap kiri (*left wing view*), seperti Marxisme, Sosialisme, dan Sosial Demokratik (Spicker, 1995). Namun demikian, dan ini yang menarik, konsep kesejahteraan negara justru tumbuh subur di negara-negara demokratis dan kapitalis, bukan di negara-negara sosialis.

Dinegara-negaraBarat,kesejahteraan negara sering dipandang sebagai strategi ‘penawar racun’ kapitalisme, yakni dampak negatif ekonomi pasar bebas. Karenanya, *welfare state* sering disebut sebagai bentuk dari ‘kapitalisme baik hati’ (*compassionate capitalism*) (Suharto, 2005b). Sebagai ilustrasi, Thoenes mendefinisikan *welfare state* sebagai “*a form of society characterised by a system of democratic government-sponsored welfare placed on a new footing and offering a guarantee of collective social care to its citizens, concurrently with the maintenance of a capitalist system of production*” (Suharto, 2005b). Meski dengan model yang berbeda, negara-negara kapitalis dan demokratis seperti Eropa Barat, AS, Australia dan Selandia Baru adalah beberapa contoh penganut *welfare state*. Sedangkan, negara-negara di bekas Uni Soviet dan Blok Timur umumnya tidak menganut *welfare state*, karena mereka bukan negara demokratis maupun kapitalis (Suharto, 2005b).

Di Inggris, konsep *welfare state* difahami sebagai alternatif terhadap the Poor Law yang kerap menimbulkan stigma, karena hanya ditujukan untuk memberi bantuan bagi orang-orang miskin (Suharto,

1997; Spicker, 2002). Berbeda dengan sistem dalam the Poor Law, kesejahteraan negara difokuskan pada penyelenggaraan system perlindungan sosial yang melembaga bagi setiap orang sebagai cerminan dari adanya hak kewarganegaraan (*right of citizenship*), di satu pihak, dan kewajiban negara (*state obligation*), di pihak lain. Kesejahteraan negara ditujukan untuk menyediakan pelayanan-pelayanan sosial bagi seluruh penduduk – orang tua dan anak-anak, pria dan wanita, kaya dan miskin, sebaik dan sedapat mungkin. Ia berupaya untuk mengintegrasikan sistem sumber dan menyelenggarakan jaringan pelayanan yang dapat memelihara dan meningkatkan kesejahteraan (*well-being*) warga negara secara adil dan berkelanjutan.

Menurut Bessant, Watts, Dalton dan Smith(2006), idedasarnegarakesjahteraan beranjak dari abad ke-18 ketika Jeremy Bentham (1748-1832) mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin *the greatest happiness* (atau *welfare*) of *the greatest number of their citizens*. Bentham menggunakan istilah ‘utility’ (kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Berdasarkan prinsip utilitarianisme yang ia kembangkan, Bentham berpendapat bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik. Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk. Menurutnya, aksi-aksi pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan sebanyak mungkin orang.

Gagasan Bentham mengenai reformasi hukum, peranan konstitusi dan penelitian sosial bagi pengembangan kebijakan sosial membuat ia dikenal sebagai “bapak kesejahteraan negara” (*father of welfare states*).

Peran Media Dalam Proses Demokratisasi

Tidak dipungkiri bahwa kebebasan media menjadi tolak ukur bagi pelaksanaan demokrasi suatu negara. Berbagai kriteria demokrasi seperti; tersedianya ruang publik bagi pertukaran pendapat, arus komunikasi dan informasi yang bebas, terciptanya wacana publik, semuanya terwadahi oleh media. Gabriel Almond menempatkan tingkat keterpaan media (*media exposure*) sebagai prasyarat utama bagi terciptanya demokratisasi masyarakat yang sehat, selain tingkat kehidupan sosial ekonomi, pendidikan, dan konteks budaya politik masyarakat setempat.

Disamping itu, asumsi bahwa warga negara yang *well informed* dan penuh tanggungjawab merupakan salah satu pilar demokrasi, banyak melandasi penelitian keterlibatan media massa dalam pembangunan sistem politik yang demokratis. Sebagaimana Suryadi dalam artikelnya yang berjudul “Media Massa dan Sosialisasi Politik; Perspektif Teori Belajar Sosial” (ISKI, 1999), memaparkan keterlibatan media tersebut terbukti melalui perwujudannya dalam bentuk pemilihan berita yang mengandung

unsur politik dan laporan mengenai peristiwa politik yang bermakna signifikan dalam membentuk pemahaman politik masyarakat.

Bagaimana media seharusnya berperan dalam menunjang proses demokratisasi tersebut? Setidaknya ada lima fungsi media yang dapat dioperasikan dalam ”tipe ideal” masyarakat demokratis, diantaranya yakni :

1. *To inform* . Bahwa media harus mampu menyajikan berbagai informasi kepada masyarakat secara terbuka sehubungan dengan peristiwa yang terjadi disekitarnya. Dalam menjalankan fungsi ini, media dituntut untuk berperan sebagai pengawas dan pengamat lingkungan masyarakat.
2. *To educate*. Media diharapkan memberikan pendidikan dan pengetahuan kepada masyarakat akan makna dan signifikansi dari ”fakta”. Hal terpenting terkait dengan fungsi kedua ini adalah profesionalisme media dalam menjaga obyektifitas pemberitaan dan etika jurnalisisme yang dijalankan.
3. *Provide platform*. Media harus mampu menyediakan *platform* bagi pengembangan wacana politik publik, memfasilitasi pembentukan opini publik. Termasuk didalamnya penyediaan ruang publik bagi kemungkinan terciptanya konsensus demokrasi.
4. *To give publicity*. Media harus memberikan ruang publikasi bagi

pemerintah maupun institusi politik lainnya. Pada fungsi ini, opini publik didalam merubah realitas politik “obyektif” dapat berjalan secara efektif apabila aktifitas politik pemerintah berikut institusi-institusi politik lainnya diinformasikan secara transparan, dan masyarakat diberi ruang untuk mengaksesnya, sehingga tidak ada halangan bagi publik untuk turut andil dalam pengambilan keputusan dalam ruang diskursus politik yang terbuka.

5. *To serve for the advocacy*. Media dalam masyarakat demokratis diharapkan berfungsi sebagai saluran *advocacy* politik masyarakat. (Mc Nair, 1993:21)

Diluar itu, Thomas Dye dalam Ibrahim (2005: 166-167) menyatakan fungsi politis media (menurut) juga dapat diidentifikasi berdasarkan lima peran yang dijalankan, yakni: *Pertama*, menciptakan berita (*newsmaking*), yakni mensurvei dunia dan menentukan orang atau peristiwa apa yang harus atau pantas dilaporkan. Di sini media memutuskan orang, organisasi, atau peristiwa mana yang patut mendapat perhatian. Tanpa liputan media, sebagian besar masyarakat umum tak akan “tahu” tentang itu, sehingga tidak menjadi objek pembahasan politik dan tidak dianggap penting oleh pejabat pemerintah yang tidak tahu tentangnya. Perhatian media dapat menciptakan isu dan personalitas.

Kedua, menafsirkan, yakni menganalisis makna peristiwa-peristiwa dan personalitas. Media tidak hanya

memutuskan apa yang menjadi berita, tetapi juga memberi penafsiran, dengan menempatkan suatu peristiwa dalam konteks dan berspekulasi tentang konsekuensi-konsekuensinya. Pemilihan suatu sudut pandang merupakan sebetulnya penafsiran, yang bisa memberi dampak politis tertentu atas peristiwa yang diberitakan. Dengan menyarankan sebab dan dampak suatu peristiwa, media membentuk opini populer. Pemberian makna ini biasanya tidak kebal terhadap bias politik.

Ketiga, sosialisasi, yakni “mengindoktrinasi” massa pembaca/pemirsa/ pendengar ke dalam kultur politik yang berlaku. Ini adalah proses mengajarkan nilai-nilai dasar dan pandangan dunia, yang mempersiapkan individu tentang posisi mereka dalam kultur yang dominan. Sosialisasi politis bukan cuma berasal dari media, meskipun media massa termasuk yang paling berpengaruh dalam proses ini, akan tetapi juga dari sekolah, tempat kerja, keluarga, teman, dan sebagainya.

Keempat, persuasi, yakni usaha-usaha langsung untuk mempengaruhi sikap dan perilaku massa pembaca/pemirsa/ pendengar lewat komunikasi, seperti dalam kampanye-kampanye politik. Persuasi adalah komunikasi yang bertujuan dan secara sengaja dirancang untuk mengubah kepercayaan, persepsi, nilai-nilai, dan perilaku orang. Propaganda adalah juga sebetulnya persuasi, meski dalam arti yang negatif. Propaganda adalah komunikasi fakta, ide, atau opini, bukan demi

kepentingan pembaca/pemirsa/pendengar tetapi demi keuntungan si komunikator.

Kelima, menetapkan agenda, yakni merumuskan problem-problem masyarakat dan menyarankan solusi-solusi alternatifnya. Ini adalah proses terpenting dalam menentukan kebijaksanaan umum. Kondisi-kondisi dalam masyarakat, yang tidak pernah dirumuskan sebagai problem, dan karena itu tidak pernah diberi usulan-usulan solusi, tidak akan pernah menjadi isu-isu politik. Di sisi lain, kondisi-kondisi dalam masyarakat yang dirumuskan sebagai problem akan menjadi isu kebijaksanaan. Pemerintah akan terpaksa untuk memutuskan apa yang harus dilakukan.

Gagasan Perwujudan Masyarakat Sipil

Dalam mengkaji relevansi politik dan peran media bagi pengembangan masyarakat sipil dalam konteks keIndonesiaan, setidaknya perlu melakukan peninjauan kembali terhadap perkembangan konsep *civil society*. Dalam studi pustaka yang dilakukan oleh Sazali (2002: 28-37), Noer (1997:105), setidaknya terdapat lima model yang dapat ditelusuri secara ringkas mengenai gagasan *civil society* dari masa klasik hingga kontemporer, dalam tradisi pemikiran awalnya yakni pemikiran Yunani Kuno hingga Eropa-Barat.

Pertama, *civil society* yang diidentikkan dengan negara (*state*). Pemahaman ini dikembangkan oleh

Aristoteles, Marcus Tullius Cicero, Thomas Hobbes, dan John Locke. Aristoteles tidak memakai istilah *civil society*, tetapi *koinonie politike*, yakni sebuah komunitas politik dimana warga negara terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan. Cicero, yang memakai istilah *societas civilis*, yakni sejumlah komunitas yang mendominasi sejumlah komunitas lainnya. Thomas Hobbes dan John Locke, memahami *civil society* sebagai tahap lanjutan dari evolusi masyarakat natural. Bagi Hobbes *civil society* dimaksudkan untuk meredam konflik dalam masyarakat sehingga tidak terjadi *chaos*. Sementara itu, John Locke memahaminya sebagai masyarakat bernegara yang didahului proses perjanjian sosial dalam mempertahankan perilaku etis masyarakat yang menghargai hak-hak kemanusiaan.

Kedua, Penekanan makna *civil society* oleh Adam Ferguson (1767), yakni sebagai visi etis dalam kehidupan bermasyarakat untuk memelihara tanggung jawab sosial yang becirikan solidaritas sosial antar warga secara alamiah. *civil society* dipahami sebagai bentuk perubahan masyarakat dari masyarakat primitif atau barbar menuju masyarakat bernegara yang beradab. Ferguson masih mengidentikkan *civil society* dengan negara, yang digambarkan sebagai sebuah bentuk tatanan politik yang melindungi dan memperadabkan pekerjaan-pekerjaan warganya.

Ketiga, Thomas Paine (1791) yang

mulai memaknai *civil society* dalam posisi diametral dengan negara. Paine memandangnya sebagai antitesis atas negara, masyarakatlah yang lebih mampu dan memiliki kekuatan kontrol atas negara. Menurutnya kekuasaan negara perlu dibatasi campur tangannya ke dalam wilayah *civil society* agar setiap individu didalam masyarakat dapat saling berinteraksi secara kompetitif dan membangun solidaritas berdasarkan kepentingan timbal balik beserta tujuan bersama.

Keempat, George W. F. Hegel (1770-1831), mendorong mengembangkan konsep *civil society* yang subordinatif terhadap negara. Pandangan Hegel berkaitan erat dengan fenomena masyarakat bojuis Eropa yang pertumbuhannya ditandai oleh perjuangan untuk melepaskan diri dari dominasi negara. *Civil society* dinilai sebagai tempat berlangsungnya konflik pemenuhan kepentingan pribadi atau kelompok, terutama kepentingan ekonomi. Menurutnya *civil society* adalah entitas yang cenderung melumpuhkan diri sendiri dan karenanya memerlukan santunan negara melalui kontrol hukum, administrasi dan politik.

Kelima, Alexis De Tocqueville, mengembangkan teori *civil society* sebagai entitas penyeimbang atas kekuatan negara. Gagasannya lebih menekankan pentingnya penciptaan asosiasi-asosiasi warga negara yang mandiri, dengan demikian penyalahgunaan kekuasaan oleh negara yang menindas warganya dapat dicegah.

Menurutnya, *civil society* seharusnya tidak subordinatif terhadap negara, karena ia bersifat otonom dan memiliki kapasitas politik yang cukup tinggi sehingga mampu menjadi kekuatan pengimbang untuk menahan intervensi negara, dan pada saat yang sama mampu melahirkan kekuatan kritis reflektif untuk mengurangi derajat konflik dalam masyarakat sebagai proses formasi sosial modern.

Model terakhir ini diperluas oleh Juergen Habermas dengan konsep “ruang publik yang bebas” (*the free public sphere*). Secara teoritis ruang publik dapat diartikan sebagai wilayah di mana masyarakat sebagai warga negara memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik. Ruang publik yang bebas merupakan syarat bagi penciptaan sebuah masyarakat politik, sebab secara normatif, setiap individu dalam posisi yang setara dapat melakukan transaksi wacana dan praktik politik secara sehat, tanpa adanya represi. Ruang publik yang bebas merupakan elemen utama dalam perjuangan mewujudkan *civil society*. Sazali (2002: 38)

III. PENUTUP

Dengan demikian, perspektif politik dan media dalam upaya pembangunan *civil society* dapat terbentuk melalui model ruang publik Habermas. Dengan sistem politik yang terbuka, politik yang berpihak pada kepentingan masyarakat akan mampu menciptakan sistem media yang bebas sebagai perwujudan

demokrasi. Media untuk selanjutnya dapat menjalankan perannya secara fungsional dalam menunjang proses demokratisasi dengan memberikan ruang publik yang bebas pada masyarakat. Pada akhirnya, masyarakat yang *well informed, educated society* berpeluang besar bagi penciptaan masyarakat sipil sebagaimana yang diharapkan tanpa harus *vis a vis* terhadap negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ibrahim, Idi Subandy (Ed.). 2005. *Media dan Citra Muslim*. Jalasutra. Yogyakarta.
- McNair, Brian. 1993. *Introduction to Political Communication*. Second edition. Roudledge. London.
- Noer, Deliar. 1997. *Pemikiran Politik di Negara Barat*. Mizan. Bandung.
- Sazali. 2002. *Muhammadiyah dan Masyarakat Madani; Independensi, Rasionalitas dan Pluralisme*. Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) Muhammadiyah. Jakarta
- Suryadi, Karim. (1999). Media Massa dan Sosialisasi Politik; Perspektif Teori Belajar Sosial. *Jurnal ISKI edisi Komunikasi Politik*. Vol. IV/ Oktober 1999
- Priyono, Herry B. (2000). Jalan Ketiga Sebagai Utopia. *Kompas*, 28 Juni 2000
- Rumadi. (2000). Melepas Gurita Negara. *Kompas*, 30 Maret 2000.
- Suharto, Edi. 2006. Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan melalui Desentralisasi-Otonomi di Indonesia. *Makalah disampaikan pada Seminar, Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta dan Perkumpulan Prakarsa Jakarta, MM Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 25 Juli 2006*

Pedoman Penulisan

1. Artikel merupakan kajian teoritis, konsep dasar, hasil penelitian dan atau pembahasan mengenai fenomena komunikasi.
2. Artikel ditulis dengan Bahasa Indonesia sepanjang 10-20 halaman kuarto, spasi 2, huruf Times New Roman.
3. Format penulisan artikel:
 - Judul.
 - Nama Penulis (tanpa gelar).
 - Nama lembaga dan alamat tempat bekerja.
 - Abstrak dalam bahasa Inggris (tidak lebih dari 200 kata) dilengkapi dengan kata kunci (dicetak miring)
 - I. Pendahuluan (latar belakang, perumusan masalah, metode, dan landasan teori).
Masing-masing tidak dinyatakan lewat sub-sub judul.
 - II. Pembahasan (sub judul sesuai dengan topik bahasan)
 - III. Penutup (simpulan dan saran)
 - Daftar Pustaka (berisi pustaka yang dirujuk dalam uraian saja)
 - Lampiran
4. Daftar Pustaka ditulis secara konsisten dengan susunan sebagai berikut:
Pengarang. Tahun terbit. Judul. Kota Terbit: Penerbit.
Cntoh:
Griffin, Michael. 2002. A Fisrt Look at Communication Theories. London: Sage Pub.
5. Artikel dapat dikirim dalam bentuk *soft copy* (CD) dalam format *doc.* atau *rtf.*
6. Artikel yang diterima redaksi dan tidak layak muat tidak dikembalikan.
7. Artikel dikirim ke alamat redaksi:
Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Trunojoyo. P.O. BOX 2 Raya Telang-Kemal, Bangkalan 69162 atau dikirim via email ke: jurnalikomutm@gmail.com

Jurusan Ilmu Komunikasi
Universitas Trunojoyo Madura
Jl. Raya Telang Po. Box 2 Bangkalan 69162
Telp. 031-3012390/Fax. 031-3011506
Email : Jurnal.komunikasi@yahoo.com

